

BAB III

POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERHADAP JEPANG

Politik luar negeri Korea Selatan mengalami berbagai macam perubahan yang cukup signifikan dari setiap periode pemerintahan presidennya. Perubahan ini terjadi karena dari setiap pemerintahan yang berkuasa memiliki pandangan politik luar negeri yang berbeda-beda. Perubahan yang terjadi dikarenakan setiap pemerintahan memiliki kepentingan nasional yang berbeda beda pula, sehingga arah dan kebijakan dari sebuah pemerintahan dengan pemerintahan yang lain pun berbeda. Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan secara umum politik luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye. Terutama sikap politik luar negeri terhadap Jepang yang nantinya akan mempengaruhi respon Korea Selatan terhadap pemberlakuan *Japan's New Security Bills*, serta implikasi pemberlakuan *Japan's New Security Bills* pada hubungan bilateral kedua negara.

A. Gambaran Umum Politik Luar Negeri Korea Selatan Terhadap

Jepang

Park Geun Hye adalah presiden Korea Selatan ke-11 dari Partai konservatif Saenuri. Ia terpilih sebagai presiden pada Desember 2012 dan dilantik menjadi presiden perempuan yang pertama di Korea Selatan. Berbeda dengan kebijakan luar negeri beberapa presiden Korea Selatan sebelumnya, Presiden Park Geun-hye menerapkan kebijakan luar negeri baru yang ia sebut dengan *Trustpolitik Policy. Grand strategy* pada masa kepemimpinan Park Geun Hye ini

memiliki tiga pilar, yaitu kebijakan pertahanan dan keamanan yang kuat, memastikan pelaksanaan *trust diplomacy*, dan membangun rasa saling percaya dalam menyelesaikan konflik di semenanjung Korea.

Trustpolitik Policy telah menjadi rencana kebijakan yang telah lama dari Presiden Park sebelum dan sejak dia terpilih sebagai presiden. Tujuan utama dari *trustpolitik* adalah untuk meletakkan dasar dimana negara-negara tetangga dapat bekerja sama demi unifikasi Korea yang damai. *TrustpolitikPolicy* Presiden Park Geun-hye bukan hanya secara konseptual tetapi geopolitik. Bertentangan dengan konsepsi populer yaitu yang berfokus pada unifikasi dengan Korea Utara, kebijakan ini tidak hanya terbatas pada di wilayah Semenanjung Korea. Pemerintahan Park Geun-hye menargetkan tiga wilayah geografis yaitu Semenanjung Korea, Asia Timur Laut, dan Eurasia. Presiden Park Geun-hye memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan pada semua tingkat secara bersamaan untuk memperkuat satu sama lain. Seperti yang dikatakannya dalam pidato utama di *7th World Policy Conference* pada tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut,

“When the trust-building Process on the Korean Peninsula, Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative, and Eurasia Initiative move forward successfully and in sync with one another, a corridor of trust and peace will open.”

Presiden Park Geun-hye menekankan kebijakan ini akan menjadi “tambang emas” tidak hanya untuk semenanjung Korea tetapi juga untuk seluruh wilayah Asia Timur Laut dan di luar wilayah Asia Timur. Sementara *trustpolitik policy*

dianggap mengacu pada urusan hubungan dengan Korea Utara, tetapi pada kenyataannya melampaui hubungan antar-Korea. Dalam pidato pengukuhan pada tanggal 25 Februari 2013, Presiden Park Geun-hye menempatkan penekanan besar pada membangun kepercayaan tidak hanya dengan Korea Utara, tetapi juga dengan negara-negara tetangga lainnya. Dalam rangka untuk meringankan ketegangan dan meningkatkan kerja sama di Asia, "kepercayaan dengan negara-negara di kawasan termasuk Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, dan negara-negara Asia dan Kelautan lainnya" sangat diperlukan.

Perdamaian Asia Timur Laut dengan mengusung *The Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* (NAPCI) dan *Eurasia Initiative* dipromosikan dengan penuh semangat dan dikembangkan dalam konteks perdamaian oleh Presiden Park Geun-hye. Presiden Park Geun Hye melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Presiden ke Amerika Serikat pada tanggal 5-9 Mei 2013 untuk menegaskan aliansinya dengan Amerika Serikat.¹

Secara umum kebijakan politik luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye adalah membangun hubungan dengan menumbuhkan kepercayaan antar negara. Selanjutnya kebijakan politik luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang menjadi kebijakan politik luar negeri Korea Selatan yang cukup *special* karena hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang selalu mengalami pasang surut yang disebabkan isu sejarah masa lalu imperialisme Jepang yang meninggalkan trauma mendalam untuk Korea Selatan.

¹Hahyung Lee, November 2015, "Geopolitics of President Park's Trustpolitik" Center For Strategic and International Studies dalam <http://cogitasia.com/geopolitics-of-president-parks-trustpolitik/>. Diakses pada 22 Desember 2016

Presiden Park Geun-hye pada hari senin 4 Mei 2015 mengisyaratkan bahwa Korea Selatan akan memberlakukan diplomasi dua jalur atau *two track diplomacy* terhadap Jepang. *Two track diplomacy* yang dimaksud disini adalah memisahkan hubungan pemerintah saat ini dari masalah sejarah yang berasal dari pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea. Presiden Park Geun-hye berbicara dalam forum *senior aides* bahwa pemerintahannya tidak akan “mengubur kepala” dalam isu-isu sejarah yang berhubungan dengan imperialisme Jepang dimasa lalu, dengan kata lain Korea Selatan akan tetap menempatkan fakta-fakta sejarah pada tempatnya seperti dengan meminta Jepang untuk meminta maaf pada masyarakat Korea Selatan atas kekejaman imperialismenya dimasa lalu tetapi tetap menjaga hubungan kerjasama bilateral dengan baik. Presiden Park Geun-hye juga menekankan bahwa hubungan dengan Jepang akan dicapai dengan dua dimensi yang berbeda, seperti yang dikutip sebagai berikut.

“We will press forward with a clear-cut focus and direction in a different dimension.”

Hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan sempat menegang karena isu sejarah imperialisme Jepang dimasa lalu terutama isu “*comfort women*,” yang kembali diangkat oleh pemerintah Korea Selatan yang meminta Jepang untuk menyelesaikan isu tersebut dengan benar. Presiden Park Geun-hye secara khusus mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, menuduh pemerintahan Abe berupaya menghilangkan tanggung jawab Jepang terhadap penanganan isu “*comfort women*.”

Meskipun Presiden Park Geun-hye berupaya untuk menyelesaikan isu sejarah imperialisme Jepang dimasa lalu, Presiden Park Geun-hye telah menghadapi permintaan tinggi dari dalam negeri untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan hubungan diplomatik kedua negara. Serta mengurangi ketegangan antara Jepang dan Cina yang sejalan dengan penguatan hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat. Sementara beberapa diplomat Korea Selatan secara terbuka mengusulkan *two track diplomacy* terhadap Jepang, menjadikan hal tersebut sebagai pertama kalinya Presiden Park Geun-hye menyetujui gagasan tersebut di forum *senior aides*.²

B. Hubungan Bilateral Jepang - Korea Selatan dan Bayangan Masa

Lalu

Jepang dan Korea Selatan telah lama didefinisikan sebagai "tetangga dekat tapi jauh". Kedua negara dekat secara geografis, tetapi imperialisme Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945 telah meninggalkan bekas luka yang mendalam dan tetap menjadi subjek yang menyakitkan bagi kebanyakan masyarakat Korea Selatan. Jepang telah menyatakan penyesalan atas perilaku masa lalu, tetapi merasa lelah karena tuntutan untuk permintaan maaf terus menerus diulang oleh Korea Selatan. Lebih dari setengah abad kemudian, rekonsiliasi penuh antara kedua negara belum tercapai. Baru-baru ini kedua negara dan para pemimpin mereka membuat upaya untuk bergerak melampaui masa lalu dan membangun hubungan yang lebih konstruktif antara dua negara

²Kyodo, 2015, "Park signals two-track foreign policy toward Japan" The Japan Times dalam <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/04/national/politics-diplomacy/park-signals-two-track-foreign-policy-toward-japan/#.WFs6zHA2vIU>. Diakses pada 22 Desember 2016

maju di Asia Timur tersebut. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pemerintah Jepang dan Korea Selatan meluncurkan inisiatif yang berani untuk meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara pada akhir 1990-an. Dasar untuk memajukan hubungan baru telah diawali dengan kunjungan Presiden Kim Dae-jung ke Tokyo pada tahun 1998. Dalam pernyataan bersama, Presiden Kim dan Perdana Menteri Keiyo Obuchi mengumumkan sebuah inisiatif untuk membangun “*New Japan-Republic of Korea Partnership toward the 21st Century.*” Secara mengejutkan pernyataan bersama ini dilakukan dengan mengesampingkan sejarah masa lalu dan membangun hubungan yang berorientasi masa depan. Pada saat itu Presiden Kim tidak menuntut Jepang untuk meminta maaf atas kekejamannya di masa imperialisme tetapi sebaliknya Presiden Kim memuji Jepang dalam upaya pasca perang untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran dalam masyarakat internasional dengan menerapkan konstitusi perdamaian dan bantuan pembangunan luar negeri. Pemerintah Jepang menyambut dengan baik niat Presiden Kim dan melihatnya sebagai upaya untuk menutup beban sejarah masa lalu kedua negara. Selanjutnya Jepang dan Korea Selatan bersepakat untuk membangun hubungan yang konstruktif berdasarkan nilai-nilai dasar bersama seperti demokrasi liberal dan ekonomi pasar. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan Presiden Kim Dae-jung dengan Jepang pantas diberi kredit sebagai prestasi diplomatik yang penting.

Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat Korea masih menaruh dendam terhadap pendudukan Jepang, dan sikap nasionalisme masyarakat Korea sebagian besar ditentukan oleh sikap anti-Jepang. Bahkan meskipun pasca perang Jepang telah berusaha untuk meningkatkan kerjasama bilateral, kebencian Korea

Selatan kepada Jepang, diperburuk oleh perselisihan masalah sejarah, telah menjadi batu sandungan utama dalam hubungan bilateral kedua negara. Menurut Presiden Kim, inisiatif pemulihan hubungan diperlukan tekad dan pragmatisme terhadap sikap anti-Jepang masyarakat Korea Selatan. Selanjutnya Presiden Kim menyatakan bahwa kerjasama dalam berbagi bidang antara dua negara maju tidak boleh terhalang oleh emosi dari masa lalu.³

Pada tahun 2015 Jepang dan Korea Selatan menandai peringatan 50 tahun normalisasi hubungan kedua negara. Meskipun baru-baru ini terdapat kemajuan ke arah peningkatan hubungan, dalam beberapa tahun terakhir hubungan kedua negara kembali memburuk. Isu sejarah imperialisme Jepang menjadi peran utama dalam mengubah hubungan kedua negara, selain itu lingkungan kedua negara telah berubah termasuk runtuhnya struktur perang dingin dan kebangkitan Cina. Peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik biasanya merupakan sebuah *event* yang diadakan oleh kedua negara. Acara ini dibatasi pada pidato oleh pemimpin Jepang dan Korea Selatan. Kehadiran pemimpin di acara ini dipandang sebagai tanda perbaikan dalam hubungan, karena awalnya mereka tidak diharapkan untuk hadir. Pada bulan Agustus Perdana Menteri Shinzo Abe menunjukkan penerimaannya atas pernyataan yang dibuat oleh Perdana Tomiichi Murayama pada peringatan 70 tahun akhir Perang Dunia II. Pemerintah Korea Selatan menyambut ini dengan baik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi seperti ini dibutuhkan untuk menyelenggarakan pertemuan puncak yang secara bertahap didirikan, dan pada 2 November para pemimpin Jepang dan Korea

3 Seongho Sheen, 2003, "*Japan-South Korea Relation : Slowly Lifting the Burden of History?*" Occasional Paper Series Asia Pasific Center for Security Studies

Selatan mengadakan pertemuan puncak pertama semenjak tiga tahun setengah terakhir.⁴

Dewasa ini bagi Jepang, Korea Selatan merupakan sebuah negara lain, berbeda dengan masa lalu bahwa Korea Selatan merupakan objek imperialismenya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Korea Selatan masih hidup dengan bayangan masa lalu imperialisme Jepang di Semenanjung Korea. Masih mengingat dengan baik setiap perilaku kekejaman Jepang di masa lalu terhadap masyarakat Korea.⁵

Sehingga penyebab asli dari kerusakan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan adalah masalah pengenalan sejarah, memudarnya peran penting Jepang bagi Korea Selatan juga menghambat kemajuan peningkatan hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Penurunan peran penting Jepang bagi Korea Selatan adalah termasuk di dalamnya perspektif keamanan setelah runtuhnya struktur perang dingin, kemudian dari perspektif ekonomi karena globalisasi ekonomi Korea Selatan. Cina telah menjadi lebih penting untuk Korea Selatan, baik secara ekonomi maupun dari sudut pandang keamanan.⁶

Secara umum hubungan Jepang dan Korea Selatan mencapai titik terburuk mereka ketika kebutuhan strategis yang dirasakan satu sama lain berkurang (misalnya, absennya ancaman Korea Utara atau krisis ekonomi) dan ketika satu pihak percaya yang lain sedang mencoba untuk mengubah status quo tidak

4 Hidehiko Mukoyama, "Can Japan and South Korea Build A New Economic Relationship? : Recent Changes in the Global Environment May Help to Repair Relations" Pacific Business and Industries Vol. XVI, 2016 No. 59

5 Kazuo Ogura, 2015 "Japan's Perspective on Korean Peninsula :Historical Relation and Future Prospects" Japan Center of Economic Research "Asian Research" Report

6Hidehiko Mukoyama. *Loc., Cit.*

nyaman pada isu sensitif seperti sejarah imperialisme atau masalah teritorial. Saat ini daftar prioritas Korea Selatan berfokus pada penyelesaian isu wanita penghibur (mengacu pada wanita Korea yang diperdagangkan untuk seks dengan tentara Jepang selama Perang Dunia II), meskipun jumlah korban yang masih hidup menurun dengan cepat karena usia tua. Di samping itu sengketa wilayah pulau Dokdo ("Takeshima" dalam bahasa Jepang) yang berulang kali diklaim oleh Jepang. Soal revisi buku teks dan komentar politisi pada sejarah dan sengketa wilayah dapat dianggap sebagai upaya untuk mengubah status quo. Pemerintah Korea Selatan akan merasa kesal ketika politisi yang berpengaruh dan dekat dengan Perdana Menteri Shinzo Abe mempertanyakan validitas *landmark* permintaan maaf Jepang dari tahun 1993 mengenai wanita penghibur (dikenal sebagai Pernyataan Kono). Kebencian Korea Selatan tetap hidup meskipun kabinet Jepang akhirnya meminta maaf untuk persoalan tersebut, Korea Selatan menganggap bahwa permintaan maaf Perdana Menteri Shinzo Abe tidaklah tulus. Sementara itu, Jepang tersinggung ketika tuntutan hukum kepada perusahaan Jepang di Korea Selatan yang diajukan dihubungkan dengan kasus kerja paksa dari Perang Dunia II padahal Jepang menganggap bahwa semua tuntutan hukum diselesaikan lima puluh tahun yang lalu sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi hubungan mereka.

Ketika pada 2 November Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Park Geun-hye bertemu dalam *official summit meeting* pertama mereka, banyak pihak yang menyadari bahwa arah politik antara Jepang dan Korea Selatan, yang merupakan dua sekutu Amerika yang paling penting di Asia Timur, merusak kemampuan mereka untuk bekerja sama dan memimpin secara efektif di wilayah

tersebut. Meskipun 90 menit pertemuan tersebut adalah langkah ke arah yang benar, Tokyo dan Seoul diharuskan untuk tetap fokus pada tantangan jangka panjang mempromosikan kepercayaan satu sama lain yang lebih besar dan kolaborasi yang lebih produktif.⁷

Dalam *official summit meeting* tersebut kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan persoalan wanita penghibur (*Comfort Women*) yang dijelaskan oleh Presiden Park Geun-hye sebagai "batu sandungan terbesar" untuk hubungan bilateral yang ramah antara Jepang dan Korea Selatan. Selain itu Presiden Park Geun-hye menyampaikan harapannya kepada Perdana Menteri Shinzo Abe terkait pertemuan mereka, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"I hope today's summit will heal the bitter history in a broad sense and be a sincere one and an important opportunity to develop the two countries' relationship."

Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa Jepang dan Korea Selatan telah sepakat untuk mempercepat pembicaraan tentang persoalan *comfort women* pada masa perang tetapi menambahkan bahwa ia ingin hubungan bilateral menjadi berorientasi masa depan, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"On the issue of comfort women, I think we shouldn't leave this obstacle to future generations. This year is the 50th anniversary of the normalisation of

7James L. Schoff & Duyeon Kim, November 2015, CARNEGIE Endowment For International Peace, "Getting Japan-South Korea Relation Back On Track" dalam <http://carnegieendowment.org/2015/11/09/getting-japan-south-korea-relations-back-on-track-pub-61918> Diakses pada 24 Oktober 2016

Japan-South Korea relations. Keeping that in mind, we have agreed to accelerate talks for the earliest possible resolution.”⁸

Empat tahun terakhir adalah tahun-tahun terburuk bagi hubungan Jepang dan Korea Selatan, tetapi dalam beberapa konteks tertentu kerjasama masih mungkin untuk dilaksanakan. Analisis berpendapat jika ingin melihat kerjasama yang lebih besar antara Jepang dan Korea Selatan, titik awal yang harus dilakukan adalah dengan memunculkan pertanyaan yang tidak harus mengenai peningkatan hubungan Jepang dan Korea Selatan tetapi membuka pertanyaan mengenai bentuk kerjasama kedua negara tersebut. Hal tersebut menjadi jenis pertanyaan yang menerangi jalan untuk membawa kerjasama Jepang dan Korea Selatan lebih besar terlepas dari ketidakpercayaan atau antagonisme yang bertahan di antara mereka.⁹

C. Japan’s New Security Bills dan Implikasi Terhadap Hubungan

Bilateral Jepang dan Korea Selatan

Hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang masih dalam bayangan masa lalu dan terus diperbaiki dengan berusaha menyelesaikan persoalan satu persatu harus kembali menemui batu sandungan saat pemerintah Jepang memberlakukan *Japan’s New Security Bills*. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Korea Selatan pasti menyadari pemberlakuan *Japan’s New Security Bills* ini akan berimplikasi pada hubungan bilateral kedua negara. Apalagi saat

⁸ Justin McCurry, 2015, “*Japan and South Korea summit signals thaw in relations*” The Guardian dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/02/japan-south-korea-summit-thaw-in-relations>. Diakses pada 4 Desember 2016

⁹ Van Jackson, April 2015 “*How to Fix the Japan-South Korea Relationship*” The Diplomat Magazine dalam <http://thediplomat.com/2015/04/how-to-fix-the-japan-south-korea-relationship/>. Diakses pada 4 Desember 2016

masyarakat Korea Selatan begitu sensitif dengan berbagai kebijakan pemerintah Jepang yang berkaitan dengan isu sejarah hingga persengketaan teritorial.

Sebagaimana dicatat, Korea Selatan secara tradisional merupakan fokus Jepang dalam jangkauan keamanan regional Asia Timur dan sebagai *partner* selain Amerika Serikat. Pada kenyataannya Jepang dan Korea Selatan banyak dipertimbangkan sebagai *partner* ideal karena kedua negara melakukan *shared values, geostrategic interests and outlook*, hingga *geography* dan kedua negara merupakan aliansi Amerika Serikat di Asia Timur. Berkaitan dengan *security agreement* Jepang dan Korea Selatan memiliki *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* yang merupakan sebuah kesepakatan rutin yang menetapkan bentuk *military information sharing* yang akan dilaksanakan.¹⁰

Namun kesepakatan tersebut baru secara resmi ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2016 ini. Sudah dua kali terdapat rencana untuk menandatangani kesepakatan tersebut tetapi selalu mengalami pembatalan. Pemerintah Korea Selatan membatalkan acara untuk menandatangani kesepakatan tersebut hanya beberapa jam sebelum acara tersebut dimulai, hal tersebut disebabkan oleh tekanan domestik Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan pada saat itu merasa keberatan dengan keputusan Menteri Luar Negeri Jepang pada bulan Maret 2015 yang merevisi deskripsi hubungan Jepang dan Korea Selatan yang sebelumnya merupakan “*an important neighboring country which shares the basic common values of freedom, democracy, a market economy with Japan*”

10 Brad Glosserman, 2016 “*Peak Japan and its implications for regional security*” Special Report Australian Strategic Policy Institute

menjadi “*the most important neighboring country for Japan.*” Tetapi mengikuti *official summit meeting* pada November 2015 pemerintah Jepang dan Korea Selatan menyepakati untuk membangun kembali hubungan bilateral dan memulai kerjasama yang signifikan dalam hal menghadapi ancaman stabilitas keamanan regional.¹¹

Dalam *welcoming speech* acara *Korea-Japan Festival* pada tahun 2015 di Seoul, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byun-se berusaha menghindari pembicaraan langsung mengenai *Japan’s New Security Bills*, tetapi tetap menyebutkan hal yang mengindikasikan sejarah masa lalu (dengan keputusan pemerintah Jepang untuk memberlakukan *Japan’s New Security Bills*) tetap memberikan efek terhadap hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Sebagaimana yang dikutip sebagai berikut :

“Korea-Japan relations are still affected by issues that root back to the unfortunate past of modern history.”

Selain itu Menteri Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa setiap negara di dunia kebanyakan memiliki persengketaan dengan negara tetangga, untuk itu Menteri Yun men-*highlight* esensi dari “*building trust*” dalam rangka untuk sama-sama melewati berbagai perbedaan.¹²

Sebenarnya di wilayah Asia Timur telah ada sikap saling ketergantungan ekonomi bersama. Termasuk terdapat kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi antara pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Tetapi seringkali setiap kerjasama

¹¹*Ibid.*

¹²*Lee Sung-eun. Loc., Cit*

yang bangun dihambat oleh rasa saling tidak percaya atas masalah keamanan. Tentu saja hal tersebut berakar dari sejarah masa lalu imperialisme Jepang yang selalu berakhir dengan kritik terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah Jepang apabila berkaitan dengan isu sejarah atau persengketaan teritorial. Termasuk pemberlakuan *Japan's New Security Bills* yang menuai berbagai kecurigaan dari para tetangganya di Asia Timur terutama Korea Selatan. Jepang dianggap akan memiliki pengaruh yang rumit pada stabilitas keamanan regional.¹³

Dengan pemerintah Jepang memberlakukan *Japan's New Security Bills*, pemerintah Korea Selatan yakin bahwa rasa tidak percaya kepada Jepang akan semakin meningkat. Ketika rasa tidak percaya begitu tinggi hal tersebut akan berimplikasi pada hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam kerjasama ekonomi. Hubungan bilateral yang dilandasi rasa tidak percaya akan membawa pengaruh buruk pada setiap bentuk kerjasama yang dilakukan. Terdapat dampak ekonomi yang memburuk dari tidak stabilnya hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Normalisasi hubungan bertepatan dengan melemahnya yen dan penguatan won, kemudian perlambatan perekonomian Korea Selatan. Nilai dolar dari perdagangan antara kedua negara telah jatuh dari tahun ke tahun dalam tiga tahun berturut-turut sejak 2012, selain itu terdapat penurunan jumlah wisatawan Jepang yang berkunjung ke Korea Selatan. Situasi tersebut sangat menimbulkan kekhawatiran dan mendorong Keidanren untuk mengeluarkan pernyataan yang menyerukan Jepang dan pemerintah Korea Selatan untuk mengatur pertemuan sesegera mungkin yang terlaksana pada November 2015.¹⁴

¹³Tan Ming Hui, "*Japan's New Security Laws : Pragmatic or Revisionist Move?*" Rajaratnam School of International Studies Vol.4, 2015 No. 164

¹⁴Hidehiko Mukoyama. *Loc., Cit.*

